

LAPORAN THESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SALILING (SAMBANG LIHUM
KELILING) SEBAGAI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM MENCEGAH
PASUNG DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



Dina Aulia Insani

NIM 21.C2.0077

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

LAPORAN THESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SALILING (SAMBANG LIHUM
KELILING) SEBAGAI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM MENCEGAH
PASUNG DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum



Dina Aulia Insani

NIM 21.C2.0077

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk kesehatan jiwa. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya perlindungan pemenuhan hak pelayanan kesehatan jiwa dengan standar tertinggi, mengingat dengan berbagai keterbatasannya, ODGJ berada dalam posisi rentan yakni dapat mengalami stigma negatif dan diskriminasi. Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjut terutama rumah sakit jiwa (RSJ) masih tidak merata di Indonesia, begitu pula dengan jumlah dokter spesialis kedokteran jiwa. Belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa dapat mengakibatkan ODGJ menjalani Pasung. RSJ Sambang Lihum menggagas Program inovasi pelayanan publik yaitu Saliling. Program inovasi Saliling RSJ Sambang Lihum ditetapkan sebagai program untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa langsung pada masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan untuk mencegah pasung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi kebijakan Saliling sebagai pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ di Provinsi Kalimantan Selatan, mengetahui dan mengeksplorasi implementasi kebijakan Saliling dalam mencegah dan mengurangi Pasung, serta mengetahui faktor-faktor penghambat maupun pendukung kebijakan Saliling. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji implementasi Kebijakan Saliling untuk mencegah dan mengurangi Pasung bagi ODGJ. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara nasional pengaturan dan kebijakan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ telah ada, dimana secara nasional hak pelayanan ODGJ telah diatur dalam UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan teknis berupa peraturan menteri kesehatan. Di RSJ Sambang Lihum, Direktur Rumah Sakit juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait Saliling. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien terutama ODGJ untuk mencegah pasung, RSJ Sambang Lihum secara khusus telah mengeluarkan kebijakan yang bernama Kebijakan Saliling. Kebijakan ini dalam program kerjanya melibatkan lintas sektor sehingga dapat memenuhi jangkauan pelayanan kesehatan jiwa dalam rangka mencegah pasung. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Saliling ini yaitu faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis. Kendala yang masih menjadi faktor penghambat utama adalah pada faktor teknis yaitu jumlah anggaran, SDM dan waktu pelaksanaan. Adapun saran yang diberikan adalah perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan koordinasi terutama di tingkat kabupaten terkait pelaksanaan kebijakan saliling.

Kata kunci : pelayanan kesehatan jiwa, pencegahan pasung, perlindungan hak asasi

ABSTRACT

Mental health is a basic human right for every citizen without exception. The government is obliged to ensure adequate health services to protect the fulfillment of their right to health services with the highest standards. Mental illness patients with their limitations are most stigmatized and discriminated against. In Indonesia, psychiatric hospitals are still uneven, as are the psychiatrists and health workers specialized in mental health. Mental health services and the rights of patients with mental illnesses are still not optimal, as a result, many patients with mental illnesses experience shackles. Sambang Lihum Psychiatric Hospital initiated the public service innovation program, namely Saliling (Sambang Lihum Keliling). This public service aims to provide mental health services directly to people and prevent shackling.

The purpose of this study is to determine the regulation and implementation of the Saliling policy as the fulfillment of health service rights for patients with mental illness in South Kalimantan Province, explore the implementation of the Saliling policy in preventing and reducing shackling, as well as inhibiting dan supporting factors of Saliling policy. The research method used is descriptive-analytic with a sociological juridical approach that examines Sailing policies. Data analysis using qualitative methods.

The study concludes that legal protection of patients' mental illness right to health services and prevention of shackling through Saliling policies can be fulfilled. The Saliling policy in its implementation has legal policies and the program coordinates and collaborates with other institutions. The legal basis for the right to mental health services and shackling prevention is the health law and the Minister of Health Regulation. Factors that influence are juridical, social, and technical. The main inhibiting factor is the amount of budget, human resources, and program schedule. The advice given is that it is necessary to socialize and improve coordination, especially at the district level related to the implementation of Saliling policy.

Keywords: mental health service, preventing shackling, protection of human rights